Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PROSTITUSI ONLINE
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU DI
INDONESIA

Rizky Karo Karo*
rizky.karokaro@uph.edu

Debora Pasaribu**
debora.pasaribu@uph.edu

Elsya Sulimin***
elsyau97@gmail.com

ABSTRACT

The crime of online prostitution is a renewal of conventional prostitution. If conventional prostitution only uses one place facility/building to run an illegitimate business. In contrast, online prostitution only uses technological, the internet that makes it easier for prospective users with male / female commercial sex workers (PSK) or between potential users with pimps, PSK service brokers. The mode used is to use the means of electronic information exchange, photo exchange, video and finally meet in one place to have intimate relationships and make payments for these services. This writing uses a normative juridical method, analyzes the laws and regulations that apply to legal phenomena, online prostitution. The Conclusions are: there are factors that cause online prostitution: 1. internal factors such as family factors and friendships; 2. External factors such as avoiding tracking officers and economic factors to obtain large amounts of money but quickly. Preventive efforts can be made through educational facilities, means of economic equality & employment in the informal sector, increasing social & cultural awareness starting from the neighborhood of Neighborhood Groups (RT), supervising boarding houses or apartments / flats so as not to be misused as a place of prostitution. Whereas the repressive efforts that can be carried out are through means of providing legal sanctions based on the prevailing laws and regulations, online prostitutes, both users of commercial sex workers, prostitutes and pimps. The purpose of the criminal sanctions is to make deterrence, so that no other people will carry out online prostitution & so that these former prisoners can be well received in society.

Keywords: *Online Prostitution, Preventive Efforts, Repressive Efforts, Legal Sanctions*

ABSTRAK (Times New Roman 12pt, Cetak Tebal)

Tindak pidana prostitusi *online* adalah pembaharuan dari tindak pidana prostitusi konvensional. Jika prostitusi konvensional hanya menggunakan sarana satu tempat, satu bangunan untuk menjalankan bisnis haramnya. Sebaliknya, prostitusi *online* hanya menggunakan sarana teknologi, internet yang mempermudah calon pengguna dengan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pria/wanita penjaja seks komersial (PSK) ataupun antara calon pengguna dengan muncikari, perantara jasa PSK. Modus yang digunakan ialah menggunakan sarana pertukaran informasi elektronik, pertukaran foto, video hingga akhirnya bertemu di satu tempat untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena hukum, prostitusi *online*. Kesimpulan Penulis ialah terdapat faktor penyebab terjadinya prostitusi *online*: 1.faktor internal berupa faktor dari keluarga dan pergaulan pertemanan; 2. Faktor eksternal berupa menghindari pelacakan petugas dan faktor ekonomi untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat. Upaya preventif yang dapat dilakukan melalui sarana pendidikan, sarana pemerataan ekonomi & pekerjaan di sektor informal, peningkatan kesadaran sosial & budaya dimulai dari lingkungan Rukun Tetangga (RT), pengawasan rumah kos ataupun *apartemen*/rumah susun agar tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan ialah melalui sarana pemberian sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku prostitusi *online* baik pengguna PSK, PSK dan muncikari. Tujuan sanksi pidana tersebut ialah untuk membuat jera, agar tidak ada lagi orang lain yang melakukan prostitusi *online* & agar mantan narapidana tersebut dapat diterima dengan baik lagi di masyarakat.

Kata Kunci: Prostitusi *Online*, Upaya Preventif, Upaya Represif, Sanksi Hukum

1. PENDAHULUAN

Prostitusi adalah perbuatan merusak moral akhlak dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran. Definisi serupa juga termuat dalam *Black's Law Dictionary*, bahwasanya *prostitution is the act of practice of engaging in sexual activity for money or its equivalent, commercialized sex*.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia adalah negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Bahkan, total ada 40 ribu pekerja seks komersial menghuni lokalisasi-lokalisasi tersebut. Menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos yang menjabat saat tersebut sebagaimana dikutip dalam www.cnnindonesia.com (April,2018) bahwa sejak tahun 2013, telah berdiri 168 lokalisasi di 24 provinsi dan 76 kabupaten/kota. Data tersebut dihimpun dari dinas sosial seluruh provinsi dan berbagai sumber¹. Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat bahwa 43 dari

1 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia> diakses tanggal 2 Januari 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

168 lokalisasi prostitusi di Indonesia masih beroperasi. Kemensos menargetkan puluhan lokalisasi tersebut ditutup hingga 2019².

Lokalisasi adalah pola lama pekerja seks komersial dan muncikari (KBBI: induk semang bagi perempuan/pria lacur) menjalankan bisnis haram tersebut. Dewasa ini, teknologi internet sering disalahgunakan, muncikari menggunakan layanan komunikasi *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *telegram* dan lainnya untuk menjalankan usaha jasa tersebut. Penggunaan layanan internet tersebut untuk menghindari dan pelacakan oleh polisi, atau polisi pamong praja lainnya. Modus yang dipergunakan berbagai macam, sebelum transaksi dilakukan, ‘pembeli’ dan ‘penjual’ melakukan *chat*, percakapan terlebih dahulu, mengirim foto bahkan video untuk menarik peminat dan menyepakati tarif lalu mengajak bertemu di suatu tempat atau hanya dengan tukaran foto namun ‘pembeli’ melakukan masturbasi dengan sendirinya hanya dengan foto/video tersebut (*phone/video sex*). Tarif atau harga yang dipergunakan juga berbeda-beda, menurut data yang dimuat dalam www.kompas.com bahwa pekerja seks komersial (PSK) dalam kasus prostitusi *online* di Apartemen Margona Residence 2 memasang tariff mulai dari Rp.400.000 sampai dengan Rp.1.000.000³

Modus lainnnya telah di Tangerang, bahwa pelaku kejahatan menjalankan aksinya dengan modus menyebarkan nomor telepon premium call 0809 melalui *Short Message Service (SMS) broadcast* ke beberapa pemilik *handphone (HP)* yang bertuliskan ajakan percakapan seks. Jika ada korban yang terjebak, maka pelaku berusaha mengajaknya untuk melakukan komunikasi menggunakan telepon untuk melakukan percakapan seks secara lama-lama dengan tujuan menyedot seluruh pulsa korban atau dapat bertemu langsung untuk melakukan hubungan intim⁴.

2. Rumusan Masalah

2 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/19/p7fiiw428-kemensos-43-lokalisasi-di-indonesia-belum-ditutup> diakses tanggal 2 Januari 2018

3 <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/12551081/psk-di-kasus-prostitusi-online-depok-pasang-tarif-rp-400000-rp-1-juta> diakses tanggal 2 Januari 2018

4 <http://medan.tribunnews.com/2018/10/10/terungkap-prostitusi-online-operator-phone-s3ks-mengaku-sandra-menyedot-pulsa?page=all> , diakses tanggal 2 Januari 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya preventif terhadap prostitusi *online* di Indonesia?
3. Bagaimana upaya represif terhadap prostitusi *online* di Indonesia?

3. Metodologi Penelitian

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dilakukan menggunakan metoda studi kasus bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan satu prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

a. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder akan penulis kumpulkan dengan cara studi pustaka, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan, peraturan hukum yang relevan.

Penulis akan menggunakan bahan hukum primer seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
- f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik penulis.

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari artikel, jurnal. Dan bahan hukum tersier untuk memperjelas kelengkapan informasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

b. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan dianalisis secara lebih mendalam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat.⁶ Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terperinci dengan sistematika sebagai berikut⁷:

1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, transformasi data mentah di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Data yang dipakai akan disajikan ke tahap berikutnya.

2. Penyajian Data

Data akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, ataupun bentuk teks narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penulis akan melakukan upaya untuk mencari makna dan kesimpulan dari permasalahan yang ada, pola-pola penjelasan, dan alur sebab akibat.

6 Saifudin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.7

7 Molcong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm.28

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online Di Indonesia

Banyak wanita muda dan anak-anak yang menjadi PSK diberbagai tempat, mulai dari sudut kota besar sampai sudut pelosok desa sekalipun. Pemandangan tersebut sudah bukan rahasia lagi. Adat ketimuran di Indonesia menganggap PSK dianggap tabu sehingga mereka mendapatkan citra kurang baik di masyarakat. Menjadi PSK terkadang terpaksa karena ada jebakan atau kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi dalam perdagangan manusia. Akan tetapi ada juga yang menjadi PSK karena alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, meskipun berpendidikan tinggi. Dengan demikian tingkat pendidikan tidak bisa dijadikan ukuran moral⁸.

Menurut hemat **Penulis**, terdapat 4 (empat) faktor utama penyebab terjadinya prostitusi *online* di Indonesia, yakni:

a. Hubungan keluarga tidak harmonis

Keluarga adalah sistem sosial dan sistem hukum terkecil. Bermula dari keluarga, maka kehidupan sosial kemasyarakatan seseorang dapat diukur. Memang tidak dapat digeneralisir, namun tingkat keharmonisan, keterbukaan, kerukunan di keluarga adalah kunci utama seorang anak tidak berhadapan dengan hukum. Jikalau dalam keluarga tersebut, anak pernah menjadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan dari orang tua, maka anak tersebut menjadi depresi, mencari pelarian/pelampiasan sehingga mencoba prostitusi baik menjadi pengguna ataupun menjadi korban prostitusi;

b. Lingkungan Pergaulan Pertemanan

Pepatah bijak mengatakan ‘pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik’. Salah memilih teman, salah pergaulan. Jikalau teman pergaulan pernah mengajak ke tempat lokalisasi, iming-iming jika tidak ketempat tersebut maka tidak diterima di kelompok tersebut sehingga orang tersebut mencoba prostitusi dan berujung kepada ketagihan. Salah memilih pacar –pacar mengajak untuk melakukan

8 Oksidelfa Yanto, “Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Ahkam, Ilmu Syariah Vol. XVI, No.2, Juli 2016, ISSN: 2407-8646, Hlm.191

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hubungan intim dengan ancaman apapun, dengan dalih apapun, dengan dalih cinta. Sehingga setelah berhubungan intim, namun si laki-laki meninggalkan begitu saja maka akan membuat si perempuan merasa dirinya tidak berharga lagi, merasa ingin membalas dendam kepada pria dengan cara ‘menjual’ tubuhnya di tempat prostitusi namun ‘tidak menjual jiwa-nya.’

Namun, sebaliknya, jika lingkungan pertemanan adalah baik, berkumpul di komunitas suatu agama, komunitas yang memiliki program positif maka orang tersebut tentu akan terhindar dari tindakan melawan hukum khususnya prostitusi.

c. Faktor Ekonomi

Keinginan untuk memiliki barang-barang mewah, untuk mengenakan baju-baju mahal, keinginan untuk makan di tempat elit, untuk berlibur ke tempat yang mahal, berfoya-foya, keinginan untuk mengganti *HP* yang terbaru dan tercanggih namun tidak memiliki uang, gaji yang cukup. Sehingga pria/wanita tersebut memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial dengan dalih bahwa akan dibayar mahal, akan ‘dipelihara’, hidup bersama tanpa status perkawinan hanya demi uang. Menurut hemat **penulis**, seorang manusia ingin bertahan hidup dan membutuhkan uang namun tidak memiliki kemampuan/*skills* bekerja sehingga jalan terakhir adalah ‘menjual’ tubunya di dunia prostitusi.

d. Faktor Menghindari Petugas yang Berwenang

Prostitusi konvensional mudah terlacak, mudah ditutup, para pelaku mudah ditangkap, dihukum dan lebih mahal karena harus menyewa tempat. Oleh karena itu, solusinya adalah para muncikari,

5. Upaya Preventif Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia

Definisi preventif menurut KBBI ialah bersifat mencegah supaya tidak terjadi apa-apa. Upaya preventif terhadap prostitusi *online* di Indonesia berarti adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual baik kepada wanita/pria. Menurut hemat **Penulis**, upaya preventif tersebut harus dilakukan di 4 (empat) bidang,

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yakni a. pendidikan, b. pemerataan pekerjaan informal, c. ekonomi, d. sosial dan budaya.

a. Upaya preventif melalui pendidikan.

Salah satu tujuan Negara sudah sangat jelas, tegas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ialah hak setiap warga negara⁹, setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayinya.¹⁰ Amanat tersebut telah diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN). Bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹¹.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah ataupun pendidikan informal yang menyangkut pengembangan moral, akhlak, dengan cara bekerja sama dengan pemuka agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga psikologi ataupun *stakeholders* lainnya yang terkait.

Selain itu, pendidikan hukum juga wajib diberikan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan tindak kriminal. Menurut hemat **penulis**, pendidikan hukum sangat penting agar masyarakat terhindar dari jeratan hukum dari perbuatan yang dilarang walau pada dasarnya semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*) namun lebih baik, jika pendidikan hukum, pendidikan peraturan perundang-undangan disosialisasikan. Hingga akhirnya pendidikan hukum dapat sebagai masukan bagi pembuat undang-undang untuk mewujudkan hukum yang adil.

9 Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

10 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945

11 Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendidikan hukum dapat memberikan kontribusi kepada parlemen yang membuat undang-undang dengan Presiden, demikian pula ikut berkontribusi dalam bentuk pemikiran-pemikiran hasil penelitian kepada para hakim yang memutus perkara di pengadilan untuk terus memastikan bahwa mereka mempergunakan kapasitas mereka untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan bermartabat¹².

b. Pemerataan Pekerjaan Informal

Pendampingan kepada masyarakat kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, misalnya keterampilan tata rias, *make up*, keterampilan salon, keterampilan menjahit wajib diajarkan oleh Pemerintah melalui instansi terkait agar mencegah wanita terlibat atau menjadi pelaku prostitusi *online* dan untuk memberikan pekerjaan bagi wanita/pria yang telah menjalani hukuman karena tindak pidana prostitusi sehingga pria/wanita mantan narapidana tersebut tidak menjadi pelaku prostitusi kembali.

c. Upaya Preventif melalui Ekonomi

Upaya juga berkaitan dengan upaya poin b, bahwasanya setelah pria/wanita baik mantan narapidana tindak pidana prostitusi memiliki penghasilan yang lebih mulia, halal, tidak melawan hukum. Dan, Pemerintah baik melalui Bank milik Pemerintah, *stakeholders* terkait juga harus bekerja sama misalnya dengan mempermudah cara memberi pinjaman dan melunasinya.

d. Sosial dan Budaya

Pada dasarnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan menjaga budaya bangsa dengan cara apapun. Peningkatan sosial kebudayaan melalui berbagai cara dan partisipasi berbagai macam pihak. Misalnya, dari tingkat pemerintahan terendah, Ketua Rukun Tetangga harus mengetahui tidak adanya penyalahgunaan rumah kos sebagai tempat prostitusi oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dan kerja sama juga dari warga sekitar,

12 Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Persepektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jawa Timur, Setara Press, hlm.34

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jika ada warga sekitar mencurigai dan melaporkan kepada polis jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, seringnya keluar masuk wanita dengan pakaian minim dengan pria yang berbeda-beda.

6. Upaya Represif Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia

Definsi represif menurut KBBI ialah penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan. Hal itu semua harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat beberapa ciri penting *rechtsstaat* yakni: a. adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis penguasa dengan rakyat; b. adanya pemisahan kekuasaan Negara; c. diakui dan dilindungi hak rakyat (*vrijheidsrechten van burger*).¹³

Upaya represif adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk memberantasan prostitusi baik *online* atau *offline*. Upaya represif yang dapat dilakukan ialah penutupan lokalisasi di pelbagai daerah, pemenjaraan (*ultimatum remidium*) bagi pekerja seks komersial, pemakai dan tentu saja bagi mucikari.

Menurut Hull,T Sulistyarningsih dan Jones sebagaimana dikutip oleh Mia Amalia bahwa Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis: pertama, legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminalisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi¹⁴

13 Jimly Assihiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 16-17.

14 Mia Amalia, artikel berjudul "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.1 No.1 (Maret 2018), Universitas Islam Bandung, ISSN: 2597-7962, Hlm.84

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menurut hemat **penulis**, upaya represif ini didasari oleh faktor penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni: a. faktor hukum, peraturan perundang-undangnya sendiri, b. faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, c. faktor sarana atau fasilitas pendukung, d. faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, e. faktor kebudayaan¹⁵.

Jikalau kelima faktor ini dapat berjalan dengan baik, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak seperti pada salah satu contoh penelitian dibawah ini, bahwa Menurut Rafliangga dan V. Indah Sri, bahwasanya terdapatnya perspektif masyarakat tentang adanya prostitusi di area Parangkusuma ini juga telah menambah stigma buruk yang juga dikaitkan dengan berbagai efek yang dialami pada masyarakat sekitar dan pengembangan pariwisata. Masalah lain yang diakibatkan dengan adanya prostitusi yakni karena para pekerja seks termasuk dalam tindakan tunasusila. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tergolong dalam sesuatu yang melanggar dan menentang norma¹⁶.

Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa, Beberapa masyarakat menganggap jika prostitusi yang ada di kawasan Parangkusuma sangat sulit sekali dihilangkan. Adanya Prostitusi di kawasan Parangkusuma telah menciptakan berbagai dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut tercermin pada mereka yang tidak senang akan kehadiran prostitusi. Terdapat juga faktor lain yang menjadikan prostitusi di daerah kawasan Parangkusuma ini bisa bertahan cukup lama. Hal tersebut, dikarenakan ada semacam kongkalikong antara pihak pelaku prostitusi dengan para penegak hukum¹⁷

15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 8.

16 Rafliangga P, V. Indah Sri, "Dampak Praktek Prostitusi Terhadap Pengembangan Pariwisata di Sekitar Parangtritis, Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017, Hlm. 9.

17 *Ibid*, hlm.15

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berikut adalah analisis **Penulis** didasarkan faktor hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap upaya represif pemberantasan tindak pidana prostitusi *online*. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, hukum bertujuan untuk memberikan keamana dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat. Selain mengatur tentang kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya namun juga mengatur hubungan di antara manusia¹⁸. Menurut hemat **penulis**, hukum diciptakan untuk membuat hidup manusia indah harmonis bermasyarakat dan tertib. Menurut analisis **penulis**, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi *online* di Indonesia ialah:

6A. UU ITE dan Prostitusi *Online*

Payung hukum tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui teknologi, internet, komputer adalah UU ITE. Menurut hemat **penulis**, prostitusi tentu melanggar kesusilaan. Definisi kesusilaan menurut KBBI ialah 1. Perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, 2. Norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.

Adapun norma tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang demikian: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Jikalau Pasal 27 ayat (1) UU ITE dilanggar maka diancam dengan Pasal 45 UU ITE yang demikian: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

18 Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, h. 16.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mendistribusikan¹⁹ dan/atau mentransmisikan²⁰ dan/atau membuat dapat diaksesnya²¹ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU ITE: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Menurut hemat **penulis**, UU ITE tidak dapat menjerat, menghukum wanita/pria yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, namun Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE dapat digunakan oleh polisi, jaksa untuk menjerat muncikari, ‘penjual’ pria/wanita tunasusila terkhususnya jika mereka menggunakan sarana teknologi, internet untuk melakukan bisnis haramnya tersebut.

Penulis setuju bahwasanya jika tindakan eksploitasi melibatkan akan maka si pelaku dihukum dengan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Namun, bukan hanya pelaku yang dihukum melainkan korban wajib dipulihkan dengan cara yang tepat misalnya dengan pendampingan moral, pendidikan oleh psikolog, rohaniawan ataupun orang yang tepat.

19 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik

20 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

21 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

6.B. KUHP dan Prostitusi *Online*

Berdasarkan Pasal 296 KUHP yang mengatur demikian: "barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Pasal 506 KUHP yang mengatur demikian Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Menurut hemat **penulis**, KUHP sebagai payung hukum untuk menghukum muncikari, penjual PSK. Memang tidak dapat dijamin bahwa jika muncikari dipenjara maka prostitusi hilang begitu saja, namun jika muncikari dipenjara, hal tersebut dapat mencegah timbulnya prostitusi baru.

6.C. UU TPPO dan Prostitusi *Online*

Definisi tindak pidana perdagangan orang (tpo) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.²² Adapun definisi dari Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Salah satu bentuk tppo ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yang mengatur demikian: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun definisi Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial²³.

Menurut hemat **penulis**, UU TPPO juga adalah sarana peraturan yang dapat digunakan hanya untuk menghukum muncikari. Menurut hemat **penulis**, muncikari adalah orang yang melawan hukum, amoral karena memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan uang dengan cara mengeksploitasi pria/wanita, muncikari tidak memikirkan dampak psikologis, dampak kesehatan PSK ataupun pengguna PSK tersebut.

6.C. UU Pornografi dan Prostitusi *Online*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Payung hukum yang mengatur tentang pornografi ialah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UU Pornografi). Adapun defnisi Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat²⁴.

Menurut hemat **penulis**, UU Pornografi salah satu norma yang dapat menghukum PSK adalah dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.” Jika melanggar ketentuan ini, maka berdasarkan Pasal 30 UU Pornografi dapat diacani dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

6.D. Perda DKI Jakarta 8/2007 & Prostitusi *Online*

Salah satu Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia yang melarang tentang praktek pornografi adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda KU). Bahwa salah satu pertimbangan Perda tersebut ialah rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Perda KU bahwa setiap orang dilarang untuk: a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial. Jika setiap orang terbukti melanggar ketentuan Perda KU maka berdasarkan Pasal 61 Perda KU dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Menurut hemat **Penulis**, Perda KU ini dapat sebagai payung hukum bagi penegak hukum untuk memenjarakan PSK, muncikari untuk menciptakan ketertiban umum dan menjaga moral akhlak masyarakat.

6.D. Penutupan Lokalisasi

Menurut Menteri Sosial yang menjabat saat tersebut Idrus Marham (sekarang-Agus Gumiwang Kartasasmita), penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan aturan perundang undangan. Namun yang tak kalah penting, prostitusi sangat bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik²⁵.

Menurut data Kemensos per Mei 2018 Lokasi yang ditutup masing-masing berada di Dukuh Mola, di Simpang Kodok dan di RT 12 Desa Sungai Pakit, Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota. Setelah ditutup, Pekerja Seks Komersial (PSK) akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing dan akan disiapkan dana pendukung sesuai

25 <https://www.kemensos.go.id/berita/menju-indonesia-bebas-lokalisasi-prostitusi-2019> diakses tanggal 2 Januari 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tugas dan fungsi Kemensos, yaitu bantuan stimulan usaha ekonomi produktif, bantuan jaminan hidup, dan transport lokal²⁶.

Menurut hemat **Penulis**, penutupan lokalisasi adalah langkah yang tepat untuk mengurangi tindak pidana prostitusi *online*, namun setelah penutupan, Pemerintah melalui dinas terkait wajib memberikan pelatihan, pendampingan kepada mantan PSK agar memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi dan dapat memiliki penghasilan yang haram.

Namun, tidak kalah penting adalah pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat lainnya bahwasanya mantan PSK dari tempat lokalisasi tersebut tidak boleh dihujat, dihina. Mengingat, bahwa terdapat satu kisah moral yang mengisahkan bahwa seorang Pria berdiri kokoh membela seorang wanita yang diduga perempuan yang berzina di suatu tempat dari rencana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara ingin melempari wanita tersebut dengan batu secara ramai-ramai karena dianggap sebagai dosa, aib bagi suku bangsa tersebut. Pria tersebut menyuruh wanita tersebut untuk bertobat, dan wanita tersebut berjanji untuk itu. Berdasar kisah tersebut bahwasanya seorang dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor terjadinya prostitusi *online* disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri dari hubungan keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan pergaulan pertemanan. Faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi dan faktor menghindari petugas yang berwenang;
- b. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk memberantas prostitusi *online* di Indonesia ialah melalui 4 (empat) sarana yakni: 1. sarana pendidikan, pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan hukum, 2. Upaya pemerataan pekerjaan

26 <https://www.kemensos.go.id/berita/menju-indonesia-bebas-lokalisasi-prostitusi-2019> diakses tanggal 2 Januari 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

informal dan 3. Upaya preventif melalui pendampingan ekonomi oleh *stakeholders* terkait, misalnya Bank Pemerintah, Bank Swasta; 4. Upaya dalam peningkatan sosial & budaya. Bahwasanya masyarakat wajib turut aktif dalam memberantas prostitusi baik *online* ataupun konvensional

- c. Upaya represif yang dapat dilakukan ialah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku & setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku PSK, muncikari ke jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana prostitusi lagi serta dapat diterima lagi di dalam masyarakat melalui profesi baru mereka yang lebih mulia.

Saran

Saran Penulis ialah

- a. Polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya harus lebih sering lagi melakukan patroli siber, patroli di dunia maya dengan cara mengecek *website* , ikut menjadi anggota grup baik *facebook*, *whatsapp* yang dicurigai sebagai komunitas prostitusi *online*;
- b. Masyarakat harus lebih aktif dan langsung melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika menemukan *website*, *whatsapp group*, *facebook group*, *twitter account* yang dicurigai sebagai pelakana prostitusi *online*.

4. DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

Assihiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung, 2005

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Mertokusumo, Sudikno Teori Hukum, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2011.

Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2006.

Prasetyo, Teguh, *Pembaharuan Huukm Persepektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jawa Timur, Setara Press, 2017.

Soekanto, Soerjono Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

b) Artikel Jurnal

Mia Amalia, artikel berjudul “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.1 No.1 (Maret 2018), Universitas Islam Bandung, ISSN: 2597-7962

Rafliangga P, V. Indah Sri, “Dampak Praktek Prostitusi Terhadap Pengembangan Pariwisata di Sekitar Parangtritis, Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017

Oksidelfa Yanto, “Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Ahkam, Ilmu Syariah Vol. XVI, No.2, Juli 2016, ISSN: 2407-8646

c) Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia> diakses tanggal 2 Januari 2018

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/19/p7fiw428-kemensos-43-lokalisasi-di-indonesia-belum-ditutup> diakses tanggal 2 Januari 2018

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/12551081/psk-di-kasus-prostitusi-online-depok-pasang-tarif-rp-400000-rp-1-juta> diakses tanggal 2 Januari 2018

<http://medan.tribunnews.com/2018/10/10/terungkap-prostitusi-online-operator-phone-s3ks-mengaku-sandra-menyedot-pulsa?page=all> , diakses tanggal 2 Januari 2018

<https://www.kemsos.go.id/berita/menuju-indonesia-bebas-lokalisasi-prostitusi-2019> diakses tanggal 2 Januari 2018

<https://www.kemsos.go.id/berita/menuju-indonesia-bebas-lokalisasi-prostitusi-2019> diakses tanggal 2 Januari 2018